

**OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh:

WIRI ARIANA
NPM: 1503110177

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **WIRI ARIANA**
NPM : 1503110177
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul : **OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019**

Medan, 18 September 2019

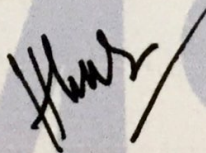
Pembimbing



AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom



Dekan

DR. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **WIRI ARIANA**
NPM : 1503110177
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

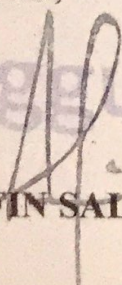
PENGUJI I : **NURHASANAH NASUTION., S.Sos, M.I.Kom** (.....)

PENGUJI II : **Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si** (.....)

PENGUJI III : **AKHYAR ANSHORI., S.Sos., M.I.Kom** (.....)

PANITIA PENGUJI

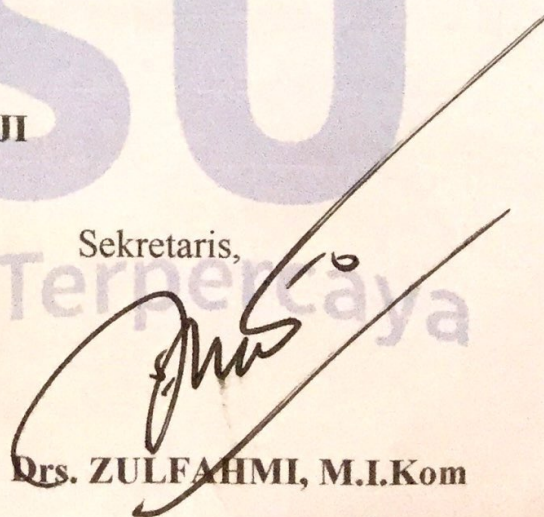
Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya WIRI ARIANA, NPM 1503110177

menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Agustus 2019

Yang menyatakan,




WIRI ARIANA

Opini Masyarakat Asahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Wiri Ariana
1503110177

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Opini Masyarakat Asahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu pendapat masyarakat Asahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 serta perkembangan politik saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian adalah masyarakat Asahan, Kelurahan Gambir Baru, Lk II. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2019 hingga bulan April 2019. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang masyarakat yang menyalurkan hak suaranya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Hasil dari penelitian ini adalah minat masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 sangat tinggi namun, minat dalam mencari dan menyaring berita sangat rendah, hal ini membuat banyak sekali masyarakat mengkonsumsi isu-isu *hoax* yang beredar, sehingga masyarakat cenderung sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak.

Kata kunci : Opini Publik, Pemilihan Umum, Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Politik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallamu'alaikumwr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih judul skripsi: **Opini Masyarakat Asahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.**

Penelitian ini merupakan penelitian yang belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Peneliti menyadari keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam mengerjakan penelitian ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Ridarto** dan ibunda **Milawati** yang telah memberikan kasih dan sayang serta doa dan dukungan terbaiknya kepada penulis, tidak lupa pula kepada kakak dan abang saya yang sangat saya sayangi **Piping Angela, Taufik,** dan **Fikri** yang selalu memberikan dukugan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak DR. Arifin Saleh, S.Sos.M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos.M.Ikom Ketua Program Studi Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos,M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos,M.I.Kom Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen-dosen dan Staff Pegawai di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini,terutama Andreano Al Ramadhan Hutagalung, Mulki, Ali Nafiza Tussalam, Tengku Herly Sapta, Romy Dwi Putra Ramadhan, Desi Irmayani, Silvia Gusnita, Muhammad Agung Maulana, Rizky Ade Ryanda, Nofri Affandi, dan Laudry Darmawan.
10. Buat teman terbaikku Vinkan Dwi Agustin, Nur Indah, Mayang Sari Nurhanif, Dinda Audelia, Nurul Aulia Putri, Suvia Agustin, Nurul Wisuda Yanti, dan Anggun Rahayu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian serta memberikan semangat dan kasih sayang nya selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun dari segenap pembaca akan penulis terima dengan sepenuh hati. Dengan dukungan dan bantuan yang telah penulis dapatkan semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat balasan yang baik pula dari Allah S.W.T Amin YaRabbal'alamiin. Akhir kata. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Medan, 18 Agustus 2019

Peneliti

Wiri Ariana
1503110177

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 3 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II URAIAN TEORITIS..... | 6 |
| 2.1 Komunikasi..... | 6 |
| 2.1.1 Pengertian Komunikasi..... | 6 |
| 2.1.2 Model Komunikasi..... | 6 |
| 2.1.3 Komponen Dasar Komunikasi..... | 7 |
| 2.1.4 Tipe Komunikasi..... | 8 |
| 2.1.5 Strategi Komunikasi..... | 9 |
| 2.1.6 Proses Komunikasi..... | 11 |
| 2.1.7 Fungsi Komunikasi..... | 12 |
| 2.1.8 Prinsip-prinsip Komunikasi..... | 13 |
| 2.2 Komunikasi Politik | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.1 Pengertian Komunikasi Politik..... | 15 |
| 2.2.2 Fungsi Komunikasi Politik..... | 24 |
| 2.2.3 Pola-pola Komunikasi Politik..... | 24 |
| 2.2.4 Faktor-faktor Komunikasi Politik..... | 25 |
| 2.3 Opini Publik..... | 27 |
| 2.3.1 Pengertian Opini Publik..... | 27 |
| 2.3.2 Ruang Lingkup Opini Publik..... | 32 |
| 2.3.3 Unsur-unsur Opini Publik..... | 32 |
| 2.3.4 Karakteristik dan Fungsi Opini Publik..... | 33 |
| 2.3.5 Sikap Individu Terhadap Opini Publik..... | 38 |
| 2.3.6 Mengubah dan Membentuk Opini Publik..... | 40 |
| 2.4 Pemilihan Umum..... | 41 |
| 2.4.1 Sistem Pemilihan Umum..... | 42 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 45 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 45 |
| 3.2 Kerangka Konsep..... | 45 |
| 3.3 Definisi Konsep..... | 46 |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian..... | 46 |
| 3.5 Informan/Narasumber..... | 47 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 48 |
| 3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 49 |
| 3.9 Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian..... | 49 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 51 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 51 |
| 4.3 Pembahasan..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| 5.1 Simpulan..... | 69 |
| 5.2 Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
| LAMPIRAN..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana komunikasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945.

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepas dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU.

Pilihan terhadap sistem pemilu tertentu juga akan dapat menjadi ukuran sejauh mana konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Semakin sistem tersebut memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan lebih mendekati hakikat kedaulatan rakyat. Begitu juga sebaliknya, semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakikat kedaulatan yang dikandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR dan pasca-perubahan UUD 1945 dipilih langsung oleh rakyat tentunya tidak menjadi persoalan berarti dalam konteks pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain system pemilihannya sederhana, sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga tidak berubah-ubah. Lain halnya dengan sistem pemilihan anggota legislatif. Apabila diamati lebih jauh, system pemilihan anggota legislatif pasca-reformasi selalu berubah. Artinya, sistem pemilu Indonesia terus berdinamika dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya (Fahmi, 2011: 6-7)

Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Namun sejak pemilu tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang berbeda dari pemilihan umum sebelumnya, karna sejak pemilu 2004 pemilu yang dilaksanakan merupakan pemilihan umum yang bersifat khusus. Berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum, asas penyelenggaraan pemilu

harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas. Sebagai negara demokrasi dan menganut pluralism tugas dan tanggung jawab negara adalah mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang semestinya agar bangsa Indonesia mampu tampil dengan negara-negara lain didunia. Perbaikan kualitas moral bangsa salah satunya lewat memperkuat basis integritas penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Opini Masyarakat Asahan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana opini masyarakat Asahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu, maka penelitian ini hanya dilakukan terhadap masyarakat, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui opini masyarakat Asahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu politik dan pemilihan umum di Indonesia dan di Kabupaten Asahan pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui opini masyarakat Asahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi, sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bagian ini menguraikan tentang pengertian komunikasi, pengertian komunikasi politik, opini publik dan pengertian pemilihan umum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan dan narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Menurut Louis Forsdale, ahli komunikasi dan pendidikan, *“communication is the process by which a system is established, maintained, and altered by means of shared signals that operate according to rules”*. Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini komunikasi juga dipandang sebagai suatu proses. Kata signal maksudnya adalah signal yang berupa verbal dan nonverbal yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan orang yang menerima signal yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari signal yang diterimanya. Misalnya setiap bahasa mempunyai aturan tertentu baik bahasa lisan, bahasa tulisan maupun bahasa isyarat. Bila orang yang mengirim signal menggunakan bahasa yang sama dengan orang yang menerima, maka si penerima akan dapat memahami maksud dari signal tersebut, tetapi kalau tidak mungkin dia tidak memahami maksud dari signal tersebut, tetapi kalau tidak mungkin dia tidak dapat memahami maksudnya. (Arni, 2009: 2-3).

2.1.2 Model Komunikasi

Model Lasswell, model komunikasi yang menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu *who*

(siapa), *says what* (mengatakan apa), *in which medium* atau dalam media apa, *to whom* atau kepada siapa, dengan *what effect* atau apa efeknya.

Model Lasswell ini yang dimaksud dengan pertanyaan *who* tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan. Pertanyaan kedua adalah *says what* atau apa yang dikatakan. Pertanyaan ini adalah berhubungan dengan komunikasi atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Isiyang di komunikasikan terkadang sederhana dan sulit dan kompleks. Pertanyaan ketiga adalah *to whom*, menanyakan siapa yang menjadi *audience* atau penerima dari komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator berbicara atau kepada siapa pesan yang ia ingin disampaikan diberikan. Pertanyaan keempat adalah *through what* atau melalui media apa. Yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, buku dan gambar. Yang terakhir adalah *what effect* atau apa efeknya dari komunikasi tersebut. (Arni, 2009: 5-7).

2.1.3 Komponen Dasar Komunikasi

Komponen dasar komunikasi ada lina yaitu, pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan dan balikan.

- 1) Pengirim pesan
Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pean atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak si pengirim pesan.
- 2) Pesan

Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa verbal maupun nonverbal. Pesan secara verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, memo, sedangkan pesan yang secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, radio dan sebagainya. Pesan yang nonverbal dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan nada suara.

- 3) Penerima pesan
Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterima.
- 4) Saluran
Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari sipengirim dengan penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan kita dengar.
- 5) Balikan
Balikan adalah respons terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan.

2.1.4 Tipe komunikasi

Seperti halnya definisi komunikasi, klasifikasi tipe atau bentuk komunikasi di kalangan para pakar juga berbeda satu sama lainnya. Klasifikasi itu didasarkan atas sudut pandang masing-masing pakar menurut dan bidang studinya. Menurut Cangara (2004: 34-41) tipe komunikasi yaitu:

- a. Komunikasi dengan Diri Sendiri (*Intrapersonal Communication*)
Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi didalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi ini karena adanya seseorang

yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang di amatinya atau dalam pikirannya.

- b. Komunikasi Antar Pribadi (*Interpersonal Communication*)
Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antaradua orang atau lebih secara tatap muka.
- c. Komunikasi Publik
Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi retorika, dan komunikasi khalayak. Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan di sampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.
- d. Komunikasi Massa
Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film.

2.1.5 Strategi Komunikasi

Dalam konteks komunikasi, untuk menyusun strategi komunikasi ada empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Mengenal Khalayak
Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling berhubungan, tapi juga saling mempengaruhi.
- 2) Menyusun Pesan
Setelah mengenal khalayak langkah selanjutnya ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi

khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Perhatian ialah pengamatan terpusat, karena itu tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian awal dari suatu efektifitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan *AA procedure atau from Attention to Action procedure*. Artinya membangkitkan (*Attention*) untuk selanjutnya menggerakkan seseorang atau orang banyak melakukan kegiatan (*Action*) sesuai tujuan yang dirumuskan.

3) Menetapkan Metode

Dalam hal ini metode penyampaian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: menurut cara pelaksanaannya dan menurut isinya. Menurut cara pelaksanaannya dan menurut isinya. Menurut cara pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu metode *redundancy (repetition)* dan *canalizing*. Menurut bentuk isinya dikenal dengan metode informatif, persuasif, dan edukatif.

4) Penetapan Media Komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat menggabungkan salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik yang dipergunakan, karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahan itu, pemanfaatan media radio sebagai alternatif strategi dakwah memerlukan perencanaan persiapan yang baik dengan memperhatikan faktor-faktor di atas agar memperoleh hasil yang optimal.

2.1.6 Proses Komunikasi

Proses komunikasi terbagi menjadi empat tahap, yaitu:

- 1) *Proses Komunikasi Secara Premier*
Merupakan proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang (simbol) sebagai media atau saluran. Lambang ini umumnya bahasa, tetapi dalam situasi-situasi komunikasi tertentu lambang-lambang yang digunakan dapat berupa kiasan (*gesture*), yakni gerakan anggota tubuh, gambar, warna dan lain sebagainya.
- 2) *Proses Komunikasi Secara Sekunder*
Merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
- 3) *Proses Komunikasi Secara Linier*
Merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Proses komunikasi secara linier umumnya berlangsung pada komunikasi media. Karena komunikasi media, khususnya media massa, yakni surat kabar, radio, televisi dan film para komunikator media massa seperti wartawan, penyiar radio, reporter, televisi dan sutradara film menunjukkan perhatiannya terhadap permasalahan ini.
- 4) *Proses Komunikasi Secara Sirkular*
Merupakan terjadinya *feedback* atau umpan balik yaitu arus dari komunikan kekomunikator. (Effendy, 2003: 33-39).

2.1.7 . Fungsi Komunikasi

Menurut Harold D. Lasswell dalam Nurudin (2008), fungsi-fungsi komunikasi ialah sebagai berikut:

- a) Penjagaan/pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*). Fungsi ini dijalankan oleh para diplomat, etase dan koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan.
- b) Menghubungkan bagian- bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*). Fungsi ini diperankan oleh para editor, wartawan dan juru bicara sebagai penghubung respon internal.
- c) Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi (*transmission of the social heritage*). Fungsi ini adalah para pendidik di dalam pendidikan formal atau informal karena terlibat mewariskan adat kebiasaan, nilai dari generasi ke generasi.

Sementara itu, dalam teknik komunikasi menyatakan bahwa fungsi komunikasi ini adalah:

- a) Komunikasi merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh kegiatan organisasi itu dapat untuk mencapai tujuan tertentu.
- b) Komunikasi merupakan alat untuk mengubah perilaku pada suatu organisasi.
- c) Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota organisasi.

2.1.8 Prinsip-prinsip komunikasi

- a. Konteks

Komunikasi yang bermakna akan sangat tergantung kepada cara menghubungkan dengan konteks pesan yang disampaikan. Konteks pesan tersebut akan dapat mempengaruhi orang lain dan akhirnya akan diterima tanpa paksaan.

b. Fokus

Agar komunikasi itu bermakna dan efektif perlu memperhatikan fokus tertentu. Fokus ini berguna agar penyampaian pesan tetap pada media yang digunakan.

1. Sosialisasi

Komunikasi yang bermakna dan efektif tergantung pada hubungan antara komunikator dan komunikan serta kepada siapa komunikasi itu ditujukan. Sasaran ini perlu diketahui untuk memahami situasi dari sasaran tersebut.

2. Individualisasi

Komunikasi yang bermakna tentunya perlu mengetahui sikap, kecakapan, dan kemampuan dari masing-masing komunikan secara individu atau kelompok. Biasanya individu atau kelompok tertentu mempunyai tradisi dan kekuasaan tertentu pula.

3. Unitas (*sequence*)

Untuk menjaga kelancaran proses komunikasi maka pesan-pesan harus disusun sedemikian rupa sehingga terlihat pesan yang perlu diberikan terlebih dahulu atau yang diutamakan, pesan-pesan tersebut perlu diketahui mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan atau ditentukan unit-unitnya, dan secara psikologis seorang komunikator mengetahui kemampuan dari khalayak yang dihadapi.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian yang integral dari proses komunikasi, evaluasi merupakan umpan balik. Jadi dalam hal ini peran komunikator dan komunikan sangat penting.

2.2 Komunikasi Politik

2.2.1 Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi Politik menurut Surbakti (1992:119) ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan 17 penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikasi) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang dipahami masyarakat. Sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik kedalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi, proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

Menurut Tabroni (2012:14), komunikasi politik hanya merupakan gabungan dari dua kata, komunikasi dan politik. Jika sudah digabungkan (komunikasi politik), memiliki makna yang lebih luas dan tidak sederhana. Secara internasional, komunikasi politik memang berada pada domain komunikasi. Namun

pada saat yang sama, komunikasi politik telah menjembatani dua disiplin ilmu dalam ilmu sosial, yaitu disiplin ilmu komunikasi dan ilmu politik.

Menurut Tabroni (2012:16), komunikasi politik merupakan sebuah aktivitas komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang memiliki muatan-muatan politik. Menurut Melvin (Muhtadi, 2008), kita dapat membaca sebuah aktivitas komunikasi kaitannya dengan politik dengan model transaksional simultan.

Dengan karakternya yang nonlinier, model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi politik:

- a. Lingkungan fisik, yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek what dan how pesan-pesan komunikasi itu dipertukarkan.
- b. Situasi sosiokultural, yakni komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya.
- c. Hubungan sosial, yakni status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri maupun terhadap.
- d. bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

Tiga faktor inilah yang sangat mempengaruhi bagaimana sebuah proses komunikasi politik bisa dilakukan, juga menjadi bagian penting untuk menilai efektif tidaknya sebuah komunikasi politik.

Menurut Tabroni (2012:18-20), komunikasi politik dapat juga dilakukan, misalnya dengan mendatangi langsung masyarakat di kedai-kedai kopi atau ruang public lainnya. Dari ruang publik seperti itu, para caleg dapat berdialog dengan rakyat tentang berbagai isu penting yang dihadapi rakyat. Lewat dialog akan

terfasilitasi lahirnya representasi kepentingan rakyat, yang pada gilirannya juga melahirkan representasi kualitas wakil rakyat. Sampai saat ini, sudah banyak defenisi tentang komunikasi politik. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

- 1) Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya itu dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan ajudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara *inheren* di dalam setiap fungsi sistem politik.
- 2) Komunikasi politik adalah proses di mana pemimpin bangsa, media, dan warga negara mengubah dan memberi makna pada pesan-pesan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan umum (*perloff*).
- 3) Aktivitas komunikasi dikatakan bersifat politik berdasarkan konsekuensi, kebenaran, dan potensinya yang memiliki fungsi pada sistem politik (Fagen, 1966).
- 4) Komunikasi politik memiliki makna setiap perubahan symbol-simbol dan pesan-pesan yang signifikan terhadap suatu keadaan politik atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.
- 5) Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mngaturinya sedemikian rupa “penggabungan kepentingan” dan “perumusan kepentingan” untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik.
- 6) Komunikasi politik merupakan penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi, seperti komunikator, pesan dan lainnya.

- 7) Komunikasi politik merupakan area komunikasi memiliki perhatian khusus terhadap aspek politik.
- 8) Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang bermuatan politik untuk tujuan kebijakan dengan berbagai konsekuensi yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan konflik.
- 9) Komunikasi politik adalah yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Susanto, 1979)
- 10) Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

Pendapat ilmuwan politik (dalam hal ini adalah ilmuwan politik behavioralis) agak berbeda dengan pandangan ilmuwan komunikasi dalam melihat komunikasi politik. Apabila ilmuwan komunikasi lebih banyak membahas peranan media massa dalam komunikasi politik (dengan sedikit perhatian pada komunikasi antar pribadi), para ilmuwan politik mengartikan komunikasi politik sebagai proses komunikasi yang melibatkan pesan politik dan aktor politik dalam setiap kegiatan masyarakat. Ilmuwan komunikasi menilai saluran komunikasi dalam bentuk media massa merupakan saluran komunikasi politik yang sangat urgen. Sebaliknya ilmuwan politik menilai saluran media massa dan saluran tatap muka memainkan peranan yang sama pentingnya.

Namun ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi sama-sama memandang bahwa pesan dan media memiliki peranan yang penting dalam proses komunikasi

politik. Keduanya memberikan makna terhadap sebuah aktivitas politik pada tataran praktis. Di antara prasyarat yang lain, pesan dan media membuat komunikasi politik memiliki fungsi strategis.

Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasaan negara. Namun yang menjadi persoalan tidak semua individu, kelompok maupun entitas lain dalam kehidupan bernegara peduli terhadap pola komunikasi yang dilakukan disuatu komunitas. Terlebih lagi di lingkungan warga pedesaan, secara historis pola komunikasi politik yang sering dilakukan oleh para elit berkuasa justru bersifat koersif. Komunikasi politik menjadi kajian yang menarik, bukan hanya para sarjana komunikasi dan sarjana politik tetapi juga bagi politisi yang aktif di berbagai partai politik. Bahkan Plano (Mulya, 2007:29) melihat bahwa “komunikasi merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik”. Ini menjadi sebuah tantangan keberhasilan partai politik, gabungan partai dan tim sukses untuk mengusung calonnya sangat ditentukan oleh kemampuannya melihat tingkat atraktivitas dan akseptabilitas calon tersebut dimata masyarakat. Peranan komunikasi politik untuk melihat dampak dan hasil yang bersifat politik.

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari penguasa politik kepada rakyat ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu “komunikasi” dan

“politik”. Hubungan kedua istilah itu dinilai bersifat intim dan istimewa karena pada domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih luas mengenai perilaku politik. Definisi mengenai komunikasi politik dapat dikemukakan oleh Pawito (2009), mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan “Diskusi publik mengenai penjabaran sumber daya publik yakni mengenai tentang pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik, kewenangan resmi yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi resmi yakni apa yang negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman”. Pengertian ini lebih mengedepankan interaksi antara negara (*the state*) dengan rakyat atau publik. Interaksi ini dalam berbagai realitas politik dapat dicermati melalui pertanyaan-pertanyaan realitis, misalnya apa yang diperoleh rakyat, bagaimana keputusan-keputusan penyelenggara negara dibuat atau tidak, dan sejauh mana rakyat mau menerima penjabaran yang ada.

Sedangkan menurut Fagen, komunikasi politik adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Lain lagi dengan Muller yang merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (*political outcomes*), dari kelas sosial, pola bahasa dan sosialisasi. Selanjutnya Gallnor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infra struktur politik, yaitu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk kedalam peredaran (Nasution, 2002). Rumusan Gallnor

merupakan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen dalam sistem politik. Menurut Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang harus ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi ilmuwan untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Bagi Almond, semua sistem politik yang pernah, sedang dan akan ada mempunyai persamaan mendasar yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankannya (Nasution, 2002). Dari sudut rujukan ilmiah, pemikiran dari Hasrullah (1997), menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang disajikan, membicarakan peristiwa-peristiwa politik yang berdimensi komunikasi. Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam melihat komunikasi dan politik masih memakai kerangka dasar (*framework*) dari Harold D Lasswell, yaitu: *Who says What, in Which Channel, To Whom, With What Effect*.

Karena itu, seperti dikatakan Rush dan Althoff (1997), komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisai politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam konteks sosialisai politik, Graber (1984) memandang komunikasi politik ini sebagai proses pembelajaran, penerimaan dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan (*customs*) atau aturan-aturan (*rules*), struktur dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Ia menempati posisi penting dalam kehidupan sosial politik karena dapat mempengaruhi kualitas

interaksi antara masyarakat dan penguasa. Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya dan sebagainya. Perbedaan itu terletak isi “pesan”. Artinya komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Dan pada waktu yang bersama komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian melalui komunikasi politik maka rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik.

Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi politik ini terbagi dua yaitu unsur suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik terdiri dari:

- a. Lembaga eksekutif
- b. Lembaga legislatif
- c. Lembaga yudikatif

Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari:

- a. Partai politik
- b. Interest group
- c. Media massa
- d. Toko masyarakat

Menurut VJ. Bell ada tiga jenis pembicaraan dalam pengertian politik yang mempunyai kepentingan politik yang jelas sekali politis, yaitu: pembicaraan

kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman dan janji). Pembicaraan pengaruh (tanpa sanksi), dan pembicaraan otoritas berupa perintah (Littlejohn, 2009). Komunikasi politik harus dilakukan dengan intesif dan persuasif agar komunikasi dapat berhasil dan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi politik yaitu: status komunikator, kredibilitas komunikator dan daya pikat komunikator. Carl Hoveland, seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses komunikasi selalu berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam bentuk lisan oleh komunikator kepada komunikasi guna mengubah perilaku orang lain (Nimmo, 2005). Pendapat Hoveland ini menyangkut efek dari suatu proses komunikasi persuasif.

2.2.2 Fungsi Komunikasi Politik

Ada beberapa fungsi dari komunikasi politik itu di antaranya:

1. Komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kepekaan sehingga menangkap dengan jelas keberadaan sesuatu yang ditimbulkan dalam dunia politik, seperti kejadian politik yang dapat ditangkap langsung oleh komunikasi politik.
2. Komunikasi politik ini nantinya akan diperlukan dalam komunikasi internasional, hubungan internasional, maupun dalam lingkup internasional komunikasi politik.
3. Komunikasi politik juga memiliki mata rantai disiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut yang kemudian menjelaskan bahwa komunikasi politik juga berhubungan dengan media sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya.
4. Memberi peluang untuk para praktisi mempelajari.

2.2.3 Pola-pola komunikasi politik

Adapun pola-pola komunikasi yang tersusun diantaranya yaitu:

- (1) Pola komunikasi vertikal (*top down*, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
- (2) Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)
- (3) Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)
- (4) Pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi)

2.2.4 Faktor-faktor komunikasi politik

Pola-pola komunikasi itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- (1) Faktor fisik (alam), alam pun dapat mempengaruhi faktor komunikasi politik. Dengan adanya perbedaan geografis, dapat mempengaruhi komunikasi politik yang berbeda-beda. Seperti halnya, seorang pesisir pantai yang memiliki bahasa komunikasi politik berbeda dengan seseorang yang tinggalnya dikota apalagi lingkungan pemerintahan.
- (2) Faktor teknologi, ketika terjadinya perkembangan teknologi, komunikasi politikpun akan mengalami perubahan juga sehingga, komunikasi politik pun akan mengalami perubahan yang meningkat dari sebelumnya.
- (3) Faktor ekonomis, segi ekonomi pada suatu negara akan memberikan pengaruh pada perguncangan politik dan kehidupan masyarakat, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran komunikasi politik juga didalam masyarakat.
- (4) Faktor politis, dari keempat faktor diatas, sebenarnya faktor inilah yang paling mempengaruhi diantara keempat sebelumnya. Karena faktor inilah yang akan membawa dampak bagi komunikasi politik.

2.2.5 Jenis-jenis komunikasi politik

Dalam komunikasi politik ada beberapa jenis komunikasi politik antara lain:

1. Komunikasi politik digital yang mana perkembangan komunikasi di digital atau media sosial mempengaruhi keefektifan komunikasi politik. Terutama terjadi pada komunikasi politik digital, seperti apa yang pernah terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat negara Republik Indonesia kini dapat mengirim pesan dan kritik langsung kepada para tokoh melalui media sosial. Hal ini akan menimbulkan sensasi tersendiri bagi masyarakat.

Tujuan positif pada komunikasi politik digital ini yaitu agar pesan tersampaikan secara masal melalui media sosial yang mulai digandrungi masyarakat. Masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan pandangan, kebijakan, dan juga kinerja kabinet kerja yang dipimpin.

1. Komunikasi politik pers, tak hanya pejabat yang menggunakan komunikasi politik, pers pun ikut menggunakan komunikasi politik sebagai ajang informasi agar sampai ke masyarakat secara bersamaan. Hal ini terjadi khususnya pada pers di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, posisi dan peranan pers di Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengikuti perkembangan sejarah negara dan sistem politik di negara. Tapi, hal ini masih dikuatkan dengan karakter pers di Indonesia yang konstan yaitu berkomitmen di sosial-

politik. Yang sangat disayangkan adalah media massa pada umumnya tunduk pada sistem pers, sedangkan sistem pers sendiri telah tunduk pada sistem politik yang ada. Hingga kemudian menjadi media politik dan mengakibatkan komunikasi politik di dalam media massa terjadi.

2.3 Opini Publik

2.3.1 Pengertian Opini Publik

Opini publik berasal dari dua kata berbahasa latin, yakni *opinari* dan *publicus*. *Opinari* berarti berpikir atau menduga. Kata *opinion* sendiri mengandung akar kata *onis* yang berarti harapan. Kata *opinion* sendiri dalam Bahasa Inggris berhubungan erat dengan kata *option* dan *hope*, yang berasal dari bahasa latin *optio* yang artinya pilihan atau harapan. Sedangkan kata *publicus* mempunyai arti milik masyarakat luas. Dengan demikian, hubungan antara kedua kata ini, “opini publik” menyangkut hal seperti dugaan, perkiraan, harapan dan pilihan yang dilakukan orang banyak.

Opini publik adalah sejumlah akumulasi pendapat individual tentang isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap kelompok sekelompok orang. Dengan demikian, opini publik terbentuk melalui suatu kegiatan berupa debat pembicaraan, atau pertukaran informasi antara individu-individu yang berada dalam suatu kelompok. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya (*numerical majority*) namun mayoritas yang efektif (*effective majority*). Subyek opini publik adalah masalah baru kontroversial dimana unsur-unsur opini publik adalah: pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal yang bertentangan, dan reaksi pertama/gagasan baru.

Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat dibagi menjadi 4 kategori:

- 1) Pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini
- 2) Penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan.
- 3) Deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik
- 4) Kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi

Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan.

Opini publik identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat (Wikipedia).

Opini merupakan tanggapan aktif terhadap rangsangan. opini terdiri atas tiga komponen, yaitu kepercayaan, nilai dan pengharapan.

1. Kepercayaan

Kepercayaan sangat berkaitan erat dengan aspek kognitif atau pikiran seseorang. Dalam hal ini kepercayaan mengacu pada sesuatu yang dapat diterima oleh khalayak.

2. Nilai

Nilai merupakan preferensi yang dimiliki oleh seseorang terhadap tujuan tertentu dan dengan cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Nilai atau preferensi ini sangat berkaitan erat dengan aspek afektif atau perasaan seseorang. Nilai mengacu pada rasa suka atau tidak suka, penting atau tidak penting serta seberapa besar intensitasnya bagi orang tersebut.

3. Pengharapan

Pengharapan berkaitan erat dengan aspek konatif atau kecenderungan seseorang dalam bertindak di masa yang akan datang. Pengharapan sering kali juga dikatakan sebagai gerak hati, hasrat, kemauan ataupun dorongan.

Dalam proses pembentukan opini, terdapat beberapa faktor penting, antara lain latar belakang sejarah, faktor biologis, faktor sosial dan faktor psikologis. (Cangara, 2011;134-136).

Opini publik atau opini masyarakat adalah hasil penintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokrasi. Opini publik bukan seluruh pendapat individu-individu yang dikumpulkan (Abdurrachman, 1982:51). Sementara itu Cangara (2011:127) menyatakan bahwa opini publik atau pendapat umum merupakan gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum

hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (*elite*) mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isi sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra di kalangan anggota masyarakat.

Opini masyarakat atau publik merupakan salah satu bentuk dari efek proses komunikasi politik. Dalam komunikasi politik, setiap partai atau kandidat politik berusaha melakukan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik mengenai citra partainya. Salah satu cara dalam pembentukan opini publik ini adalah dengan penggunaan media massa. Media massa sering menjadi sumber informasi dan sebagai saluran komunikasi bagi para politisi. Media juga berperan dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan politik (*political talks*) yang dapat membentuk opini publik mengenai masalah politik dan atau aktor politik..

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2005:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Huntington dalam Rizkiyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan

umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Rahman (2007:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 1 Poin 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umm, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

2.3.2 Ruang Lingkup Opini Publik

Berdasarkan distribusinya opini publik terbagi menjadi tiga yaitu opini publik yang tunggal (ungkapan rakyat) disebut opini yang banyak, opini publik beberapa orang (ungkapan kelompok) disebut opini sedikit dan opini publik banyak orang (ungkapan massa) disebut opini yang satu. Ketiganya merupakan wajah opini publik yaitu opini massa, kelompok, dan opini rakyat. Dengan kata lain, dopini publik dapat menimbulkan kontroversi, antara pemerintah dan masyarakat sendiri (Chairina Husni, 2013).

2.3.3 Unsur-Unsur Opini Publik

Opini publik memiliki tiga unsur. Pertama, harus ada isu (peristiwa atau kata-kata) yang actual, penting menyangkut kepentingan pribadi. Kedua, harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang kemudian menghasilkan kata sepakat mengenai sikap, pendapat dan pandangan mereka. Ketiga, selanjutnya pendapat mereka itu harus diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk lisan, tertulis, dan gerak-gerik (Chairina Husni, 2013).

2.3.4 Karakteristik dan Fungsi Opini Publik

Opini publik mempunyai tiga fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik menurut Emory S. Bogardus (Olii, 2007:27). Ketiga fungsi itu adalah:

1. Opini publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan sebab tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak akan berjalan.
2. Opini publik merupakan pendukung moral masyarakat.
3. Opini publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga politik.

Opini publik juga berfungsi dalam menentukan apakah nilai-nilai itu diterima masyarakat atau tidak. Bila orang setuju dengan seperangkat nilai-nilai maka kekhawatiran terhadap ancaman isolasi menurun. Ketika ada perbedaan dalam permintaan nilai-nilai maka ancaman isolasi tersebut akan meningkat. (Morissan, 2013:35)

pembicaraan politik dalam pembentukan opini publik dilakukan secara verbal. Kata-kata sebagai alat konstruksi realitas politik harus dikemas secara tepat dan sesuai karena bahasa memiliki kekuatan dalam mengonstruksi kekuasaan. Tanpa bahasa, realitas tidak akan mudah disampaikan kepada publik. Individu-individu adalah publik yang terlibat secara sadar sekaligus menjadi target pemasaran politik. Khalayak membutuhkan informasi yang jelas dan objektif sehingga mengenal serta mengetahui secara jelas kebijakan, program, dan actor politik. Publik pun mempunyai hak untuk diinformasikan berbagai rencana dalam proses komunikasi politik.

Floyd Allport (Arifin, 2010:14), mengumpulkan 12 karakteristik opini publik, yaitu:

- a. Merupakan perilaku manusia individu-individu
- b. Dinyatakan secara verbal
- c. Melibatkan banyak individu
- d. Situasi dan objeknya dikenal secara luas.
- e. Penting untuk orang banyak.
- f. Pendukungnya bersedia untuk terlibat.
- g. Disadari, kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya
- h. Diekspresikan, sikap atau pendapat melibatkan ekspresi
- i. Pendukungnya tidak harus berada ditempat yang sama.
- j. Bersifat menentang atau mendukung sesuatu, adanya pro kontra.
- k. Mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama.
- l. Efektif untuk mencapai objektifitas dalam mencapai tujuan bersama.

Opini publik juga mempunyai sifat-sifat yang mencirikan proses pembentukan opini publik. Menurut Sunarjo (Wahid 2016:147), ciri-ciri ataupun sifat-sifat tersebut, yakni:

- a. Sederhana

Pesan politik pada pembentukan opini publik disampaikan dalam pernyataan atau bahasa yang sederhana agar khalayak atau publik dapat memahami pesan tersebut dengan mudah.

- b. Labil

Opini publik sangat mudah berubah jika terdapat pesan politik baru yang memudahkan diterima oleh publik. Artinya, pesan opini publik bukan sesuatu yang menetap, melainkan terbuka untuk dipengaruhi oleh sumber komunikasi politik lainnya guna membentuk opini public yang baru.

c. Afinitas

Bahasa adalah alat yang paling kuat dan mudah dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Penggunaan struktur bahasa, gaya menulis, idiom-idiom, metafora, leksikon, serta huruf abjad yang dipakai dan menyajikan suatu berita menentukan efek yang muncul.

Lebih lanjut, Nimno (Wahid, 2016: 148) berpendapat opini publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik

Komunikasi politik, peristiwa, serta karakteristik dan tujuan opini publik adalah alasan sebuah pesan politik dikonstruksi serta dipublikasikan.

b. Terdapat kontroversi

Kontroversi menandai adanya opini publik yang tidak dipercayai oleh rakyat. Sebuah opini publik tidak selalu diterima bulat-bulat oleh masyarakat, melainkan sangat mungkin menimbulkan perdebatan karena perbedaan perspektif dalam banyak sektor di antara publik.

c. Mempunyai volume

Kontroversi yang terjadi menciptakan afiliasi kelompok yang sepakat dan mendukung sebuah isu yang diperdebatkan. Sedangkan yang kontra atau tidak mendukung akan menjadi sebuah kelompok yang mengkritik, membantah, dan tidak mendukung isu yang menjadi perdebatan.

d. Relatif tetap walaupun dapat diubah dari positif ke negatif.

Opini publik cenderung bisa bertahan selama komunikator politik terus memelihara pesan-pesan tersebut dan khalayak menilai hal tersebut ‘benar’ serta setuju dengan pesan politik tertentu.

Dari definisi dan sifat-sifat opini publik tersebut, dapat dikemukakan bahwa:

- a. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa dapat mengubah opini publik seketika. Opini publik tidak akan stabil sebelum peristiwa tersebut menunjukkan perkembangan yang jelas.
- b. Opini publik sangat peka terhadap peristiwa penting.
- c. Opini pada umumnya lebih ditentukan oleh peristiwa daripada kata-kata, kecuali jika kata-kata tersebut suatu peristiwa.
- d. Pernyataan lisan dan tindakan penanggulangan hanya bisa dilakukan sebelum opini terbentuk. Hal lainnya terjadi juga pada saat orang-orang masih bimbang dan mencari keterangan dari sumber yang terpercaya.
- e. Pada umumnya, opini publik tidak mendahului kejadian, tetapi hanya bereaksi terhadap suatu kejadian atau keadaan.

- f. Opini mudah berubah, kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar bersangkutan. Kemungkinan lainnya, opini publik dibangkitkan dengan kata-kata yang diperkuat dengan peristiwa nyata.
- g. Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan pribadi. Berbagai peristiwa, kata-kata, dan hal lain memengaruhi opini bila ada hubungannya dengan kepentingan pribadi dan lain-lain.
- h. Jika menyangkut kepentingan pribadi, opini publik tidak dapat diubah.
- i. Jika menyangkut kepentingan pribadi, opini publik dalam negara demokrasi cenderung mendahului atau bahkan mendikte kebijakan pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang.
- j. Jika suatu opini didukung mayoritas yang tidak kuat atau opini tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, peristiwa berikutnya mudah mengubah opini dan arah penerimaannya.
- k. Pada saat-saat kritis, setiap orang menjadi lebih peka terhadap kemampuan pemimpinnya. Bila mempunyai kepercayaan terhadapnya, mereka akan bersedia untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab daripada biasanya. Tetapi, bila kepercayaan mereka berkurang, toleransi mereka pun akan berkurang dari biasanya.
- l. Masyarakat biasanya segan untuk menentang keputusan yang telah diambil oleh pemimpinnya dalam keadaan kritis, apalagi bila merasa mereka diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan tersebut.

- m. Membentuk opini tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu tujuan tertentu lebih mudah dari membentuk opini mengenai metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu
- n. Opini publik, sama halnya dengan opini pribadi, mengandung suatu keinginan. Bila opini didasarkan pada keinginan saja, bukan pada suatu penerangan, hal itu cenderung untuk menunjukkan perhatian yang besar pada suatu peristiwa.
- o. Semakin luas pengetahuan masyarakat tentang perkembangan kejadian dan gagasan mengenai kepentingannya sendiri, mereka semakin cenderung untuk melontarkan opini lebih yang objektif.

Opini publik mempunyai kekuatan membentuk kekuatan sosial, norm, sekaligus menghapus dan melanggengkan kekuasaan. Opini publik dapat memperkuat kebijakan dan undang-undang atau peraturan. Tanpa dukungan opini publik yang kuat, komunikator politik tidak akan mampu menjalankan perundang-undangan, kebijakan, dan program yang menjadi output dalam sistem politik. Opini publik merupakan pendukung moral dalam memelihara dan mempertahankan pengaruh serta kekuasaan bagi komunikator politik. Dengan dukungan media yang kuat, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih mudah

2.3.5 Sikap Individu Terhadap Opini Publik

Salah satu tujuan dibentuknya opini publik adalah membentuk citra positif atau negatif terhadap komunikator politik. Pembentukan citra positif oleh seseorang, kelompok, organisasi politik, dan organisasi masyarakat bertujuan

memunculkan opini positif. Opini positif dan citra positif akan sangat menguntungkan komunikator politik. Pembentukan citra positif juga terjadi pada level personal.

Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Opini berdasarkan penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah. Opini itu bisa setuju dan tidak setuju, atau menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian, baru akan diketahui bahwa ada orang-orang yang sependapat dan tidak sependapat dengannya setelah dia memperbincangkan dengan orang lain. Jadi, opini publik merupakan perpaduan opini-opini individu.

Menurut Grunig & Repper (Wahid, 2016:153) keberhasilan opini publik ditentukan oleh sikap individu-individu dalam memaknai pesan pada pembentukan opini publik. Pesan yang disampaikan pada publik politik tertentu menjadi tidak berarti sama sekali jika individu-individu yang menjadi bagian dari publik tidak memahami dan menyetujui pesan yang disampaikan komunikator politik. Oleh karenanya, mengontruksi pesan sesuai dengan karakteristik dan kapasitas publik penerima pesan sangatlah penting. Berkaitan dengan sikap individu dalam memahami opini publik, terdapat beberapa pandangan mengenai sikap individu terhadap opini publik, yaitu:

a. Orientasi

Orientasi adalah kecenderungan khalayak terhadap suatu pesan atas dasar pertimbangan dan kepentingan tertentu. Kecenderungan individu dalam memahami opini publik mencakup persepsi terhadap isu atau objek yang

sedang menjadi pembicaraan politik yang didukung oleh persepsi orang

lain yang signifikan terhadap isu atau objek yang sama.

b. Koorientasi

Dalam pemebentukan opini publik dibutuhkan banyak kesamaan penilaian

tyerhadap sebuah isu. Koorientasi adalah keadaan individu ketika dua atau

lebih orientasi individu mengarah pada isu dan objek yang sama.

2.3.6 Mengubah dan Membentuk Opini Publik

Menurut Reinald Kasali, dalam buku manajemen publik relation dan aplilasinya di Indonesia (2000), pembentukan opini publik dalam proses komunikasi politik mempunyai beberapa tahapan perkembangan:

- a. Proses waktu. Pembentukan opini publik bukan aktivitas instan atau kerjaan satu dua hari, melainkan pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan, proses pengelolaan sumber daya manusia, budgeting, media, target khalayak atau publik, control dan evaluasi. Semua proses dari pra, pelaksanaan, serta pasca membutuhkan waktu yang sesuai dengan kebijakan dan program yang ada.
- b. Cakupan (luasnya publik). Khalayak merupakan sasaran atau target pembentukan opini publik. Khalayak menerima pesan yang disampaikan oleh media berkaitan dengan poltik sebagai informasi dengan melakukan interpretasi atas pesan yang disampaikan. Khalayak berjumlah besar, tidak terlalu teridentifikasikasi secara individu, namun mereka mempunyai keterkaitan personal mengenai isu. Semakin besar jumlah khalayak yang terbentuk menjadi publik, semakin baik dan berhasil proses pembentukan opini publik yang besar menandakan bahwa dukungan politik yang baik bagi komunikator poltik.

- c. Pengalaman masa lalu. Khalayak/publik cenderung mempunyai pengalaman mengenai isu/berita yang menjadi pembicaraan. Semakin intensif hubungan antara khalayak/publik dan isu sebagai objek pembicaraan, semakin banyak persamaan pengalaman yang akan dirasakan oleh khalayak tersebut menjadi suatu konsesus. Khalayak/publik terikat dengan isu sesuai dengan pengalaman mereka.

2.4 Pemilihan Umum

Pada kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambing, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, didasari bahwa pemilihan umum tidak satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan politik, dan sebagainya.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilihan umum). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam

pemilu, oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan tahanan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut Budiarjo (2008:461), dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. *Single-member constituensi* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasa disebut system distrik).
- b. *Multi-member constituensi* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional).

2.4.1 Sistem Pemilihan Umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik system pemilihan umum terbagi dua jenis, yaitu:

1. Sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik itu
2. Sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Berdasarkan perhitungan sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis, yaitu:

1. Sistem distrik (*plurality system*), yaitu perhitungan sederhana yaitu

calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak.

Jenis sistem:

- a. Mayoritas mutlak
- b. Suara *alternative*
- c. Suara blog
- d. Sistem putaran dua

2. System semi proporsional (*semi proportional*), yaitu perhitungan

system distrik yang menjembatani proporsional.

Jenis sistem:

- a. Suara non dipindahtangankan
- b. Sistem paralel
- c. Suara terbatas
- d. Suara kumulatif

3. Sistem proporsional (*proportional system*), yaitu perhitungan rumit

yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan

bilangan pembagi pemilu.

Jenis sistem:

- a. Suara dipindahtangankan tunggal
- b. Perwakilan proporsional
- c. Daftar partai
 - 1) Daftar terbuka
 - 2) Daftar tertutup
 - 3) Daftar lokal
- d. Anggota proporsional campuran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

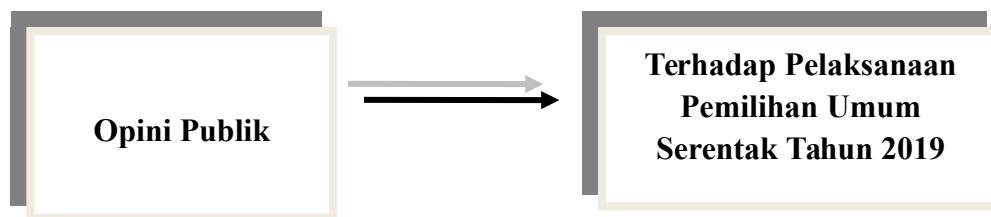
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Noor (2011:34-35) Penelitian deskriptif adalah penulisan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang jadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif Menurut Krisyantono (2014:196) dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu.

3.2 Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian sebagai dasar jawaban sementara dari masalah yang di uji kebenarannya.

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



3.3 Defenisi Konsep

Opini publik adalah pernyataan dari sikap, opini publik dapat berubahubah dalam hal intensitas dan stabilitasnya. Dengan mengacu pada interpretasi dalam bahasa Inggris dan Perancis terhadap kata opini, Noelle Neuman menyatakan bahwa opini adalah derajat persetujuan atau kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu. (Morissan, 2013:526)

3.4 Kategorisasi Penelitian

| No. | Konsep Teoritis | Konsep Operasional |
|-----|--|---|
| | Opini masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 | A. Komponen Kognitif <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian 2. Pengetahuan 3. Pemahaman B. Komponen Afektif <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Suka 2. Sikap Setuju 3. Sikap Puas C. Komponen Kognitif <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung 2. Tidak Mendukung |

3.5 Informan/Narasumber

Adapun definisi untuk menentukan narasumber adalah sebagai berikut:

1. Peranan informan/narasumber dalam data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.
2. Informan/narasumber dipilih secara purposive (*purposive sampling*) berdasarkan aktivitas mereka dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka. Peneliti dan memilih informan atau bisa juga informan yang mengajukan secara sukarela.

Adapun yang menjadi informan/narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Jalan Merpati, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informai yang dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara seperti yang ditegaskan oleh (Moleong, 2013: 190) adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) itu. Menurut Moleong (2013: 190) persiapan wawancara tak terstruktur dapat dilaksanakan menurut tahapan-tahapan tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali suatu saat pilihan hanya berkisar diantara beberapa orang menemui persyaratan.
 - b. Tahap kedua, ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. Karena responden adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya.
 - c. Tahap ketiga, adalah mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara.
2. Dokumentasi
- Menurut Gunawan (2013: 178) dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono 2014: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (Gunawan 2014: 247-252) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data Penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)
2. Paparan data (*data display*)
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Jalan Merpati, Kelurahan Gambir Baru Lk II, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Gambir baru merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia, secara detail objek penelitian ini di Jalan Merpati, Kelurahan Gambir Baru Lk II berkode pos 21221. Luas area kota Kisaran Timur 30,17 km dan berpenduduk 73,611 jiwa. Penduduk Kabupaten Asahan sebahagian besar bersuku Melayu 75% sering juga disebut Melayu Asahan atau Melayu Batubara. Ada pula suku Batak dari yang berasal dari Toba, Simalungun dan Mandailing. Suku Batak Toba adalah etnis Batak yang paling banyak di daerah ini, salah satu daerah Asahan yang memiliki penduduk mayoritas suku Batak ialah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge di mana penduduknya dikenal dengan istilah Batak Pardembanan. Sementara di wilayah perkotaan seperti Kisaran terdapat orang-orang Tionghoa. Suku Jawa sebagai transmigran juga banyak mendiami daerah Asahan. Agama yang terdapat di Kabupaten Asahan 88,87% Islam, 9,15% Kristen Protestan, 1,02% Buddha, 0,94% Katolik, 0,02% Hindu, dan 0,01% Konghucu. Sedangkan suku yang terdapat di Gambir Baru Lk II sekitar 60% bersuku Melayu Asahan dan beragama Islam sisanya bersuku Batak beragama Kristen Protestan dan Katolik. Kota Asahan tidak memiliki ciri khas yang menonjol karena merupakan kota kecil yang dikelilingi pulau dan bertumpang tindih dengan kota lain yang bermata pencaharian yang sedikit memadai khususnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Gambir Baru khususnya Lk II memiliki masyarakat yang tidak terlalu

homogen, sebagian masyarakatnya memiliki gaya yang cukup modern sebagian juga tetap mengikuti adat dan budaya leluhur yang kurang mementingkan gaya hidup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2019. Penelitian ini melibatkan 5 (lima) orang narasumber yang terdaftar sebagai pemilih tetap, pada pemilu tahun 2019 dengan rentang usia 21-66 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Gambir Baru.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum 2019, peneliti menemukan jawaban bahwa responden melihat pemilihan umum tahun 2019 adalah pemilihan umum ini tidak begitu efektif dikarenakan banyaknya pasangan calon legislatif dan kurang mengenal para calon legislatif tersebut, hal ini disampaikan oleh informan 1, sedangkan informan 2 menjawab pemilihan tahun ini dilaksanakan dengan ketat karena persaingan yang terjadi dan dari semua calon untuk memenangkan pemilihan umum baik bagi pemilihan umum calon presiden/wakil presiden, legislatif maupun eksekutif, kemudian narasumber 3 menjawab menurutnya pemilihan umum tahun ini terlihat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena melihat masyarakat banyak yang mengetahui perkembangan pemilihan umum ini, jawaban narasumber 4 mengatakan jika pemilihan umum tahun 2019 ini dilaksanakan dengan jujur maka kemungkinan akan dapat terlaksanakan dengan baik, namun beredarnya rumor ketidak jujurnya pelaksanaan pemilihan umum seperti tersebarnya surat suara yang sudah dicurangkan seperti dicoblos sehingga dikhawatirkan pemilihan

umum 2019 ini tidak terlaksana dengan jujur. Namun tetap saja berharap pelaksanaan pemilihan umum nantinya akan jujur dan efektif. Informan 5 menjawab sama seperti narasumber 4 bahwa menginginkan pemilihan umum yang jujur dan mudah-mudahan sukses terlaksana, tetapi narasumber 5 menambahkan bahwa sejauh ini banyaknya isu-isu yang terjadi belakangan ini terkait pemilihan umum salah satunya tentang pemberian hak pilih pada penderita gangguan mental yang tidak seharusnya mendapat hak pilih.

Tanggapan masyarakat terkait sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum 2019. Peneliti menemukan jawaban bahwa tidak begitu mengetahui terkait pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 karena tidak mengikuti perkembangannya secara jelas dan hanya mengetahui sekilas informasi yang di dapat dari media massa seperti televisi, sosial media dan surat kabar yang tersebar di tengah masyarakat saat ini hal ini disampaikan oleh informan 1, sedangkan narasumber 2 menjawab pemilihan umum ini sudah cukup berkembang dan lebih efektif daripada tahun-tahun sebelumnya yang kurang efektif, kemudian narasumber 3 menjawab menurutnya pemilihan tahun ini dilaksanakan dengan tertib dan lancar terlihat dari masyarakat sekitar yang begitu antusias terhadap program-program calon presiden pilihannya masing-masing. Informan 4 menjawab sama seperti informan 1 bahwa tidak mengetahui teknis pelaksanaan pemilihan umum nantinya dan banyaknya para calon, namun informan menambahkan juga bahwa Ia mengkhawatirkan terkait isu pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT akan kehilangan hak pilihnya apabila surat suara tidak tersedia lagi di TPS atau sudah habis, kemudian infoman 5 menjawab menurutnya

pelaksanaan umum tahun 2019 sepertinya tetap berjalan dengan baik namun ada beberapa kendala karena pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan sehingga akan memakan banyak waktu dari pemilihan umum tahun-tahun sebelumnya.

Pengetahuan masyarakat tentang jumlah partai politik peserta pemilihan umum 2019 ini tidak begitu memuaskan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang partai politik yang telah berkembang, seperti yang dikatakan oleh informan 1 bahwa tidak banyak pengetahuan tentang jumlah keseluruhan politik peserta pemilu, namun informan 2 menjawab bahwa jumlah keseluruhan partai politik pemilihan umum 2019 berjumlah banyak dan tidak begitu mengetahui dan hanya mengetahui beberapa partai yang memang sudah ada sejak lama seperti partai Demokrat, PDIP, Golkar, dan PAN. Sama seperti informan 2 informan 3 juga tidak banyak mengetahui keseluruhan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan tahun ini, informan 3 hanya mengetahui 11 partai politik saja dari 16 partai politik yang ada di Indonesia yaitu partai politik PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, Perindo, Nasdem, PSI, Garuda dan PKB. Selanjutnya informan 4 menjawab terkait pada pemilihan umum eksekutif yaitu Gerindra dan PDIP, dan untuk partai pada pemilihan legislatif yaitu PKS, Nasdem, PDIP, Garuda, Golkar, Demokrat, Perindo, PPP, PBB, dan PAN. Sama seperti informan sebelumnya tidak banyak pengetahuan tentang jumlah keseluruhan dan hanya mengetahui beberapa yaitu PDIP, Gerindra, PAN, PKS, Perindo, Nasdem, Hanura, PSI, PPP dan PKB.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat pelaksanaan pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan, peneliti menemukan

jawaban terhadap informan 1 bahwa menurutnya sedikit membingungkan karena mayoritas masyarakat terfokus pada pemilihan presiden/wakil presiden dan membuat masyarakat menyampingkan pemilihan legislatif yang menurutnya tidak begitu penting, sedangkan informan 2 menanggapi tidak ada permasalahan terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif jika dilakukan secara bersamaan apabila prosesnya dilakukan dengan teratur, sama seperti yang dikatakan informan 1 bahwa informan 3 dan informan 4 menjawab bahwa pemilihan legislatif dan eksekutif sangat membingungkan masyarakat sehingga masyarakat tidak banyak pengetahuan terhadap calon legislatif yang telah mencalonkan karena banyaknya jumlah calon, kemudian pemilihan umum legislatif kurang efektif dan kurang mengenal para calon legislatif sehingga menyita banyak waktu. Informan 5 juga menjawab bahwa berdampak pada efisiensi waktu dan akan menghadapi situasi bingung karena minimnya informasi terkait pemilihan umum dan calon-calon pemilihan umum 2019 tersebut.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat terhadap partai calon legislatif yang akan dipilih, sebagian masyarakat tidak mengetahui dengan pasti terhadap partai calon legislatif yang akan dipilih, seperti yang dikatakan oleh informan 1, sedangkan informan 2 menjawab akan memilih calon legislatif yang banyak menolong masyarakat dan memang partai pertain yang sudah berusia agak lama dan sudah ada sejak dahulu yaitu partai PDIP, sama seperti informan 2 bahwa informan 3 akan memilih calon legislatif dari partai PDIP. Kemudian informan 4 menjawab dari tingkat DPR RI yaitu PAN dan untuk provinsi dan kabupaten kurang mengetahui dan akan lebih mencari informasi lebih lanjut terkait calon-calon legislatif agar dapat memilih dengan cepat terhadap pilihan

calon legislatif yang akan dipilih nantinya, sedangkan informan 5 akan memilih dari partai Gerindra karena ada sedikit pengetahuan tentang informasi partai politik ataupun informasi tentang calon-calon legislatif yang dilatarbelakangi oleh partai Gerindra.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat tentang pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan para informan pilih, kemudian informan 1, informan 4 dan informan 5 menjawab bahwa mereka akan memilih pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi, kemudian informan 2 memberi jawaban bahwa karena mereka merasakan perkembangan dimasa kepemimpinan presiden yang sekarang maka akan memilih pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 01 yaitu Jokowi-Ma'aruf, informan 3 menjawab sama seperti informan 2 akan memilih calon presiden/wakil presiden nomor urut 01, informan 3 juga menambahkan karena telah melihat kenyataan terhadap program-program yang sudah dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat tentang alasan memilih pasangan calon presiden/wakil presiden tersebut, maka informan 1 menjawab bahwa Ia percaya kepada pilihan para tokoh agama yaitu Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad sehingga membuat yakin terhadap diri sendiri untuk memilih pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 02 karena pada dasarnya Indonesia bertumpu pada agama Islam bahwa pemimpin yang pantas berdasarkan latar belakang agamanya dan pendukung yang baik agamanya pula, sedangkan informan 2 menanggapi berbanding kebalik dengan informan 1 bahwa informan 2 beralasan karena di masa kepemimpinan presiden selama 5 tahun ini telah terbukti dengan meningkatnya sektor pembangunan, ekonomi, dan banyak

menolong masyarakat, maka dari itu perlu dilanjutkan kembali dan perlu dikembangkan lagi perkembangan yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi Dodo yang mencalonkan kembali untuk 5 tahun kedepan, kemudian informan 3 menjawab sama seperti informan 2 bahwa terbukti kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dan menurutnya pasangan calon nomor urut 01 yaitu Jokowi-Ma'aruf harus dua periode karena masa pemerintahannya cukup bagus dan berkembang dengan cukup baik. Informan 4 menjawab seperti informan 1 dan menambahkan bahwa menurutnya karena sikap dari pasangan nomor urut 02 gagah, bijaksana, dan tegas sehingga cocok dan lebih pantas sebagai pemimpin negeri ini dan menurutnya dapat membawa perubahan yang sangat signifikan demi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Informan 5 menjawab seperti informan sebelumnya berharap perlunya perubahan karena pilihan calon presiden/wakil presiden 02, menurutnya sikap pemimpin negeri ini yang mana seharusnya memiliki wewenang dan kekuasaan secara seimbang sehingga dapat memimpin negara dengan bijak dan tegas, karena menurutnya kondisi Indonesia saat ini perlu perubahan terkhusus dalam bidang pertahanan dan bidang ekonomi yang sekarang mengalami penurunan.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat tentang visi dan misi yang diinginkan masyarakat terhadap pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan dipilih pada pemilihan umum tahun 2019, informan 1 menjawab bahwa visi dan misi yang diharapkan agar terwujud yaitu turunnya bahan pangan, turunnya harga listrik dan turunnya harga BBM, sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Karena pada umumnya masyarakat tidak memperdulikan infrastruktur yang telah dikembangkan untuk masyarakat dan merasa lebih penting turunnya harga pangan

untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian informan 2 menjawab agar merealisasikan janji-janji masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yaitu Jokowi-Ma'aruf, karena menurutnya janji-janji tersebut sudah tepat untuk masyarakat Indonesia dan perkembangan bangsa Indonesia. Informan 3 menjawab seperti informan 1 bahwa mampu merampungkan program-program pemerintahan terhadap pembangunan jalan, harga kebutuhan sandang pangan harus diturunkan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena menurutnya itu keinginan terpenting semua masyarakat Indonesia. Kemudian informan 4 menjawab berharap memperbanyak lapangan pekerjaan, peningkatan sektor pangan dan mengoptimalkan harga agar lebih terjangkau, dan terakhir peningkatan pendapatan/gaji kerja sesuai pengalaman dan UMR. Informan 5 menginginkan peningkatan penjiagaan negara, memperbanyak lapangan kerja bagi warga negara sendiri dan meminimalisir pekerja asing yang tidak profesional, mensejahterahkan ekonomi rakyat dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, dan lebih memperhatikan masyarakat yang berprestasi untuk memenuhi sektor-sektor yang ada di Indonesia tanpa harus mengimpor buruh asing yang sebenarnya tidak begitu perlu untuk perkembangan negara Indonesia.

Hasil penelitian terkait tanggapan masyarakat tentang seberapa yakin terhadap pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan dipilih, para narasumber menjawab bahwa Insya Allah yakin terhadap pilihannya, hal ini disampaikan oleh informan 1, kemudian informan 2 menjawab merasa cukup yakin karena melihat keberhasilan kepemimpinan selama 5 tahun ini yang terus meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Indonesia dan melihat dari sudut pendukung juga banyak mendukung untuk keberhasilan pemilihan calon

presiden/wakil presiden nantinya untuk nomor urut 01, selanjutnya informan 3 merasa sangat yakin dengan pasnagan calon presiden/wakil presiden yang akan dipilih nantinya. sama seperti informan sebelum-sebelumnya bahwa informan 4 merasa sangat yakin 100% karena pendukungnya yang sangat antusias mendukung calon presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi bahwa mereka akan terpilih dan akan mejadi pemimpin selanjutnya yang dapat membawa perubahan sesuai keinginan masyarakat Indonesia. Informan 5 juga menjawab merasa cukup yakin terhadap pilihannya karena antusias warga masyarakat itu sendiri bahkan termasuk dimedia sosial yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik terhadap negara ini.

Hasil dari penelitian terkait tanggapan masyarakat tentang sikap masyarakat jika pilihannya tidak terpilih, para informan menanggapi tidak ada permasalahan siapapun presidennya, seperti informan 1 menjawab bahwa tidak ada permasalahan pada siapapun presiden/wakil presiden yang akan terpilih yang terpenting sudah menyuarakan hak pilihnya untuk memilih dan berharap yang terbaik untuk rakyat terhadap presiden yang terpilih nanti. Selanjutnya informan 2 menjawab akan menerima hasil pemilihan umum tahun 2019 dan siapapun yang terpilih nantinya namun berharap terhadap calon pasnagan yang terpilih akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dirasa sudah baik seperti yang dikatakan oleh informan sebelumnya dan informan 2 menambahkan juga yang terpenting pemilihan umum yang akan dilaksanakan ini dilaksanakan dengan jujur dan teratur. Kemudian informan 3 menjawab bahwa akan merasa biasa saja, dan tidak mempermasalahkan apapun dan tidak akan memiliki perasaan kecewa Dan tetap mendukung presiden mana yang akan terpilih nantinya, berbeda dengan

informan 4 menjawab akan merasa sangat kecewa jika pilihannya tersebut tidak menang karena sangat berharap besar untuk perubahan yang menurutnya masa kepemimpinan sebelumnya kurang mensejahterakan rakyat. Sama seperti yang dikatakan oleh informan 1, 2 dan 3 informan 5 juga menjawab tetap akan menghormati hasil pemilihan umum 2019 secara bijaksana selama pemilihan umum dilaksanakan secara adil dan tetap menerima siapapun presiden/wakil presiden yang akan terpilih nantinya.

Tanggapan masyarakat terkait tidak mendukung pasangan calon presiden/wakil presiden yang lain, maka para informan pun menjawab, sudah merasa yakin dengan pilihannya calon presiden/wakil presiden yang sudah di pilih yaitu 02, hal ini di sampaikan oleh informan 1, kemudian informan 2 menjawab tidak memilih presiden nomor urut 02 karena belum terbukti mengenai program-program yang akan dilakukan pasangan calon tersebut dan tidak yakin melakukannya sebaik dengan masa pemerintahan yang sebelumnya. Selanjutnya informan 3 menjawab menurutnya calon pasangan presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi memiliki sifat dan watak yang keras, selain itu juga alasannya dikarenakan tidak memiliki ibu negara yang seharusnya dimiliki oleh setiap presiden yang akan memimpin. Informan 4 menjawab menurutnya sudah cukup 1 periode saja yang dipimpin presiden sebelumnya yaitu Jokowi Dodo- Jusuf Kalla dan tidak meraskaan perubahan yang signifikan, malah menurutnya mengalami penurunan khususnya di bidang pendidikan yang kurang berkualitas, pelajaran disekolah juga ada yang dihilangkan seperti pelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar, bahkan dibidang ekonomi yang mana saat ini susahya mencari pekerjaan, bahan pangan tidak ekonomis dan banyaknya investor asing saat ini

yang menguasai sektor-sektor tertentu yang seharusnya masyarakat Indonesia sendiri bisa menempati sektor-sektor tersebut dan tidak mendominasi pekerja asing ataupun investor asing. Dan yang terakhir informan 5 menjawab sama seperti informan 4 bahwa perubahan dirasa menjadi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia saat ini dan sangat memerlukan penjagaan ketat terhadap perubahan Indonesia kedepannya.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Gambir Baru terhadap 5 (orang) informan atau narasumber terpilih dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pemilu 2019, terdapat beberapa hal terkait materi muatan dari jawaban para narasumber yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 5 (lima) narasumber atau informan yang telah dipilih secara acak, dapat di narasikan bahwa ketertarikan serta kesadaran masyarakat awam terhadap demokrasi dan politik yang berkembang saat ini cukup tinggi, salah satunya dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2019. Semua hal yang berkaitan dengan pemilu 2019 akan langsung direspon oleh masyarakat

Dikarenakan tingginya minat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan, bisa dipastikan bahwa masyarakat akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tingginya minat partisipasi masyarakat dalam memilih tidak lepas dari pengaruh akses informasi yang semakin mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat, seperti media sosial. Media sosial kini bahkan mulai menggantikan peran media televisi sebagai penyedia berita atau informasi. Berdasarkan hasil riset Wearsosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 menyatakan bahwa “Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 Juta orang atau sebesar 56% dari total populasi”. Hal tersebut membuktikan bahwa separuh penduduk Indonesia saat ini sudah sadar akan media sosial.

Kemajuan teknologi tersebut perlahan menciptakan masyarakat yang kritis terhadap suatu fenomena atau informasi yang sedang hangat diperbincangkan, karena siapa saja dapat mengakses informasi tersebut dan ikut memberikan komentar tanpa harus merasa terbebani dengan hal tertentu meskipun tetap dalam batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram saat ini tidak hanya menyajikan konten hiburan melainkan juga menyediakan platform informasi, berita dan update terkini mengenai hal-hal yang sedang terjadi, salah satunya mengenai pemilu 2019 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Menjamurnya berita-berita terkait pilpres 2019 mengakibatkan masyarakat hanya memandang bahwa pemilu 2019 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan didalam pemilu 2019 terdapat juga pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan secara bersamaan.

Pendapat tersebut dibuktikan penulis melalui wawancara dengan 5 (lima) narasumber dan hasilnya semua narasumber cenderung lebih tertarik dan peduli terhadap isu pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dibandingkan dengan pemilihan legislatif didaerahnya. Ketidaktahuan tersebut juga berakibat dengan menurunnya kualitas hasil suara pada pemilihan legislatif sebab semua narasumber hanya memilih partai politik nya saja karena kurangnya informasi mengenai pasangan calon legislatif mana yang akan dipilih didaerahnya.

Selanjutnya penulis mengarahkan opini masyarakat tentang pelaksanaan pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Penulis berkesimpulan bahwa saat ini terdapat polemik dimasyarakat terkait pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif akan menimbulkan suatu keadaan yang membingungkan bagi masyarakat karena banyaknya calon legislatif yang menjadi peserta pemilu 2019.

Hal tersebut dibuktikan pada wawancara penulis dengan para narasumber yang hasilnya menyatakan bahwa 4 dari 5 narasumber tidak setuju kebijakan tersebut karena dinilai tidak efektif dan membingungkan masyarakat. Banyaknya jumlah pasangan calon legislatif yang menjadi peserta pemilu tentu akan menyita banyak waktu bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya sehingga menjadikan tidak efisiennya waktu saat pelaksanaan pencoblosan di TPS nanti.

Namun disisi lain, penulis juga menanyakan kepada para narasumber bagaimana tanggapan mereka mengenai pelaksanaan pemilu 2019 secara keseluruhan dan hasilnya terdapat beragam jawaban dari para narasumber. Hal ini berbeda dari jawaban-jawaban mereka sebelumnya dimana terdapat jumlah terbanyak dengan jawaban yang sama sehingga dapat ditarik dua kesimpulan oleh penulis.

Hasilnya adalah 1 dari 5 narasumber menyatakan pelaksanaan pemilu 2019 tidak efektif karena menggabungkan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan legislatif secara bersamaan. Sedangkan 3 narasumber menyatakan pelaksanaan pemilu 2019 akan sukses terlaksana karena dilaksanakan secara ketat yang disebabkan persaingan dari masing-masing calon peserta pemilu untuk menang, dan tentunya lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, 1 narasumber lagi menyatakan kekhawatirannya bahwa pelaksanaan pemilu 2019 tidak jujur karena rumor surat suara yang telah dicoblos sebelum pemilihan.

Ada isu menarik menurut penulis mengenai jawaban narasumber terakhir yang menyatakan pemilu 2019 tidak jujur karena adanya rumor bahwa terdapat

surat suara yang telah dicoblos sebelum hari pemilihan. Hal tersebut dinilai penulis merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti media sosial.

Meskipun masyarakat dilatih untuk menjadi kritis, namun hal tersebut nyatanya malah membawa masyarakat untuk menerima apa saja berita yang disajikan melalui media sosial tanpa memilah mana yang benar atau hanya sekedar hoaks. Masyarakat cenderung menyakini dan percaya terhadap apa yang mereka lihat dan tidak mencari kebenaran berita tersebut sehingga mereka mulai mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat yang ada.

Misalnya terhadap berita pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat dua pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 2019 yaitu pasangan calon nomor urut 01 “Jokowi-Ma’ruf Amin” dan pasangan calon nomor urut 02 “Prabowo-Sandi”. Berita mengenai pencalonan mereka mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Antusiasime masyarakat terhadap kedua pasangan calon tersebut tidak hanya berlangsung didunia nyata melainkan sampai didunia maya yaitu media sosial.

Media sosial seperti facebook, twitter dan instagram dapat dijadikan sebagai sarana pertukaran informasi sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk saling berbagi informasi terkait. Sayangnya, pertukaran informasi tersebut hanya dilakukan dengan mereka yang memiliki pemikiran yang sama. Mereka hanya mau menerima informasi yang mereka anggap benar dengan pemikiran mereka. Hal tersebut menjadikan adanya pengelompokkan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan menghasilkan lingkungan sosial tidak sehat. Misalnya, opini yang dikeluarkan oleh masyarakat

mengenai pilpres 2019 cenderung menjatuhkan pihak-pihak atau pendukung pasangan calon yang tidak mereka pilih bahkan diragukan kebenarannya. Bahkan tidak sedikit dari pendukung-pendukung tersebut yang menjadi fanatik terhadap pilihannya dan membenarkan seluruh informasi terkait pasangan calon tersebut.

Berdasarkan isu diatas, dari hasil wawancara bahwa 5 narasumber tidak mengelompokkan diri mereka dan menjadi fanatik hanya karena pilihan pasangan calon yang berbeda dan berdampak pada timbulnya opini-opini yang menjatuhkan pasangan calon lain hingga ikut membuat dan menyebarkan hoaks. Namun, terdapat beberapa narasumber yang menyatakan opini mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bukan pilihannya hanya berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengan di media televisi maupun media sosial tanpa mencari kebenarannya.

Hasil wawancara tersebut bahwa 2 dari 5 narasumber memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 “Jokowi-Ma’ruf” sedangkan 3 narasumber lainnya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 “Prabowo-Sandi”. Para narasumber tentunya juga menyatakan alasan-alasan mereka memilih pasangan calon tersebut sesuai dengan apa yang mereka lihat dan dengan baik di media sosial maupun media televisi. Namun ada 1 dari 5 narasumber memberikan alasan yang menurut penulis menjadi korban berita tidak benar di media sosial. Narasumber menyatakan alasan ia tidak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 “Prabowo-Sandi” karena Pak

Prabowo memiliki watak keras, hal tersebut bahkan belum terbukti kebenarannya oleh narasumber itu sendiri.

Terlepas dari alasan narasumber diatas, sebenarnya semua narasumber memiliki alasan-alasan lain yang mereka yakini akan dilaksanakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihan mereka apabila nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2019. Tentunya alasan-alasan tersebut juga hasil analisa dari apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan sendiri selama 5 tahun ini, seperti pada narasumber berikut:

- 2 dari 5 narasumber memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 “Jokowi-Ma’ruf” dengan alasan bahwa kepemimpinan Jokowi telah terbukti selama 5 tahun ini yang sudah mensejahterakan rakyat Indonesia dengan meningkatnya sektor ekonomi dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Sedangkan 3 dari 5 narasumber memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 dengan alasan bahwa kondisi Indonesia saat ini perlu ada pemimpin baru yang diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik dan menawarkan solusi terhadap permasalahan Indonesia saat ini seperti penurunan kualitas pendidikan, tidak stabilnya kondisi perekonomian, menurunnya pertahanan negara, sehingga mereka memutuskan untuk memilih pemimpin baru yang dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang baik, dapat menyeimbangkan antara kekuasaan dan wewenang, serta berasal dari latar belakang pendidikan yang cocok dalam menyelesaikan permasalahan Indonesia saat ini.

Selain alasan-alasan tersebut diatas, para narasumber juga menyatakan visi misi apa yang mereka ingin agar diwujudkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka pilih jika nantinya terpilih sebagai pemenang pilpres 2019, namun apa yang mereka sampaikan sepertinya kurang tepat dengan visi misi masing-masing pasangan calon presiden dan wapres yang disampaikan pada debat pilpres 2019, namun menurut penulis tetap berkaitan. Para narasumber hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wapres yang mereka pilih jika nantinya terpilih menjadi presiden dan wapres.

Misalnya pada narasumber 1, 4, dan 5 menyatakan bahwa mereka mengharapkan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 “Prabowo-Sandi” yang menjadi pilihan mereka apabila berhasil terpilih sebagai pemenang pilpres 2019 agar mewujudkan keseimbangan harga pangan dan kebutuhan lain seperti listrik dan BBM, memperbanyak lowongan pekerjaan bagi warga negara sendiri dan meningkatkan gaji pekerja sesuai UMR, mengurangi penambahan pekerja asing yang tidak profesional, meningkatkan sektor ekonomi dengan mengurangi impor dan memperbanyak kegiatan ekspor maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, narasumber 2 dan 3 yang memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 “Jokowi-Ma’ruf” menyatakan harapan mereka apabila pasangan calon yang mereka pilih tersebut memenangkan pilpres 2019 yaitu merealisasikan janji-janji pada saat masa kampanye kemudian merampungkan program pemerintah terhadap pembangunan jalan, harga

kebutuhan sandang pangan dapat diturunkan sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara melalui narasumber untuk mengetahui opini masyarakat asahan dalam pemilihan umum 2019 di kelurahan gambir baru, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hampir semua narasumber tertarik terhadap politik, karena menurut para narasumber politik itu merupakan hal yang penting terhadap masa depan bangsa. Namun, ada juga yang menganggap politik itu susah di percaya karena banyaknya isu-isu, hoaks, dan fitnah yang tersebar di masyarakat baik dari media cetak, media sosial, dan media elektronik yang tidak seharusnya di lakukan oleh para tokoh politik. Ini membuktikan bahwa masyarakat antusias terhadap pemilu tahun 2019.
2. Para narasumber tidak banyak memiliki wawasan terhadap perkembangan politik mereka mudah menyerap informasi yang belum tentu valid kebenarannya dari informasi yang tersebar ditengah masyarakat. Terbukti dengan para narasumber tidak terlalu mengetahui dan minimnya informasi tentang rekam jejak dari kedua pasangan calon yang akan mereka pilih dan rata-rata narasumber tidak mengetahui secara lengkap tentang partai politik yang ada. Dan lebih terfokus terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden, karena menurut mereka pemilihan legislatif sedikit

mbingungkan masyarakat karena banyaknya calon legislatif dari berbagai partai.

3. Para narasumber berpendapat bahwa media yang ada saat ini tidak netral dalam pemberitahuan, terlebih lagi tentang pemilihan presiden. Menurut para narasumber banyak media yang lebih condong ke salah satu kubu dan itu seharusnya tidak boleh terjadi karena akan menyusahkan masyarakat yang ingin mencari informasi yang objektif, terlebih masyarakat hanya menyerap informasi yang tersebar begitu saja di tengah masyarakat.
4. Para narasumber narasumber sudah menetapkan pilihan, namun ada juga yang masih belum yakin terhadap pilihannya karena masih kurang informasi terhadap visi dan misi baik dari kedua kubu calon presiden maupun calon legislatif.

5.2 Saran

Para narasumber sudah memiliki opini yang baik tentang pemilihan presiden dan legislatif. Narasumber juga sudah mengetahui bebrapa visi dan misi dari kedua kubu walaupun tidak banyak yang tau visi dan misi calon legislatif.

Namun, adapun saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Narasumber harus lebih sering mencari informasi tentang politik terkini dan informasi tentang kedua calon presiden dan calon legislatif agar dapat memilih presiden dan anggota legislatif sesuai dengan keinginan tidak asal memilih saja.
2. Narasumber harus mampu memilih berita yang objektif dan tidak langsung percaya terhadap informasi yang tersebar begitu saja di masyarakat yang tidak jelas asal usulnya.

3. Para narasumber tidak boleh labil dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif dan jangan terpengaruh dengan mudah dengan politik uang.
4. Penyelenggara harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pemilu terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cangara, Hafied, 2004, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Chairina Husni, Alien. 2013. *Opini Publik di Media Sosial Twitter (Analisis Isi Opini)*
- Effendy, Onong Uchjana, 1984, *Ilmu Teori dan Praktek Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fahmi, Khairul.2011.*Pemilihan Umum&Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Marhaeni, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad, Arni, 2009, *Ilmu Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Morrison, 2013, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Olii, Helena, 2007, *Opini Publik*, PT Indeks, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sugyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Roni, Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Wahid, U. 2016.*KomunikasiPolitik*. Bandung: Simbiosis Rekamata Media.
Kekerasan Seksual Pada Anak).Universitas Hasanuddin Makassar.

WEBSITE

- Al-Buthony, Ridho.2013.Satelit di <http://rydhoalbuthony.blogspot.com> di akses pada pukul 11.00, pada tanggal 17 Januari 2019.

Aswab, Nanda, Pratama.2018. Satelit di <http://nasional.kompas.com> diakses pada pukul 15.58, pada tanggal 15 Januari 2019.

Wikipedia.Satelit di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Opini_public diakses pada pukul 16.40, pada tanggal 16 Januari 2019.

Wikipedia, Satelit di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum, diakses pada 14.00, pada tanggal 17 Januari 2019.

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Opini Masyarakat Asahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Nama Peneliti : Wiri Ariana

Prodi/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama Informan :

Waktu Wawancara :

1. Identitas Informan

- a. Jenis Kelamin :
- b. Agama :
- c. Usia :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap pemilu tahun 2019?
- 2) Sejauh mana pengetahuan Bapak/i tentang pelaksanaan pemilu 2019?
- 3) Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I mengetahui jumlah partai politik peserta pemilu 2019?
- 4) Menurut bapak/Ibu/Saudara/I, bagaimana pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan?
- 5) Jika pemilu dilaksanakan hari ini, dari partai manakah caleg yang akan bapak/ibu/saudara/I pilih?
- 6) Jika pemilu dilaksanakan hari ini, pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan bapak/ibu/saudara/I pilih?
- 7) Apa alasan bapak/ibu/saudara/I memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut?
- 8) Visi dan misi apa yang bapak/ibu/saudara/I inginkan agar terwujud terhadap paslon yang akan bapak/ibu/saudara/I pilih?
- 9) Seberapa yakin bapak/ibu/saudara/I terhadap paslon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih?

- 10) Bagaimana sikap bapak/ibu/saudara/I jika paslon presiden yang bapak/ibu/saudara/I pilih tidak terpilih sebagai presiden?
- 11) Mengapa bapak/ibu/saudara/I tidak mendukung paslon presiden yang lain?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

UMSU

Regul | Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 472/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 20 Rajab 1440 H
27 Maret 2019M

Kepada Yth : **Lurah Kelurahan Gambir Baru Lk. II**
Kecamatan Kisaran Timur, Asahan
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **WIRI ARIANA**
N P M : 1503110177
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2017/2018
Judul Skripsi : **OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

Dr. **ARIF SALEH**, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR
KELURAHAN GAMBIR BARU**

Jalan Dr.FL.Tobing No.69 Kisaran Kode Pos 21221

Gambir Baru, 22 April 2019

Nomor : 93 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

**Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UMSU Medan
di -**

Tempat

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Nomor : 472/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 27 Maret 2019 perihal pada pokok surat diatas.

Dengan ini kami terima surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa untuk bahan penyusunan Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Mahasiswa atas nama :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : WIRI ARIANA |
| NPM | : 1503110177 |
| Fakultas / P.Studi | : Ilmu Komunikasi |
| Semester | : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2017/2018 |
| Judul Penelitian | : OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 |

Demikian Surat Balasan ini kami berikan ,atas perhatian kami ucapkan terima kasih

LURAH GAMBIR BARU
KELURAHAN GAMBIR BARU
MUHLIS SIRAIT,SH
PENATA
NIP.19740619 200502 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 2 Januari 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

- Nama lengkap : WIRI ARIANA
- N P M : 1503110177
- Jurusan : Ilmu Komunikasi
- Tabungan sks : 128 sks, IP Kumulatif 3,01

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|----|---|-------------|
| 1 | Optimasi masyarakat Asahan terhadap pelaksanaan pemecahan umum serentak tahun 2019 | 20/12-2018 |
| 2 | efektifitas humas dalam meningkatkan keamanan pelanggan kantor pos cabang kota usaran | |
| 3 | manajemen kegiatan kehumasan dalam membangun program kerja di sekitar intelijen dan keamanan Polres kota usaran | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Seruskan kepada Dekan untuk
 penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

(WIRI ARIANA)

Medan, tgl.20....

Ketua,

IB: AKHYAR ANSHOR



Cerdas & Terpercaya

Agar surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 11.157/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/UMSU/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal **28 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **WIRI ARIANA**
N P M : 1503110177
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun 2018/2019
Judul Skripsi : **OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

Pembimbing : **Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/UMSU/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440H/ 23 November 2018 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 28 Desember 2019

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 26 Rabiul Akhir 1440 H
03 Januari 2019 M

Dekan,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar Terpercaya

Peringkat ini agar disebutkan
lainnya

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sk-3

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 17 Januari 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : WIKI ARIANA
N P M : 1503110177
Jurusan : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 157.../SK/II.3/UMSU-03/F/2018.. tanggal 28 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Opini Masyarakat Asahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019

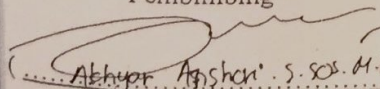
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

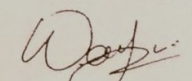
Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing


(..... Akhyar Anshari, S.Sos. M.Hum.....)

Pemohon,


(..... WIKI ARIANA.....)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 041/UND/Il.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Sabtu, 19 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Lab FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom

| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENGUJI | PEMBIMBING | JUDUL SKRIPSI |
|-----|---------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 16 | SUWANDA FITRA RIZKY | 1503110158 | TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom., H. | JUNADI., S.Pdi., M.Si. | KOMUNIKASI DAKWAH MELALUI FILM "KETIKA HATI INGIN HIJRAH" DI CHANNEL YOUTUBE |
| 17 | IWIRI ARIANA | 1503110177 | Dr. LEYLIA KHAIRANI. | AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom. | OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 |
| 18 | DENAYU FATHANAH | 1503110035 | IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos., M.AP. | AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom. | PERSEPSI PEREMPUAN ACEH TENTANG TRADISI MAYAM DALAM ADAT PERKAWINAN (STUDI PADA PEREMPUAN ACEH DI KOTA MEDAN) |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Medan, 11 Jumadil Awwal 1440 H
 17 Januari 2019 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

...Cerdas & Terpercaya
 ...surat ini agar disebutkan
 ...tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **WIRI ARIANA**
 N P M : **1503110177**
 Jurusan : **Ilmu Komunikasi**
 Judul Skripsi : **OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|-----------------------------|------------------|
| 1. | 17/01-2019 | BIMBINGAN PROPOSAL | |
| 2. | 11/04-2019 | BIMBINGAN PEDOMAN WAWANCARA | |
| 3. | 12/04-2019 | ACC PEDOMAN WAWANCARA | |
| 4. | 15/07-2019 | BIMBINGAN SKRIPSI | |
| 5. | 16/07-2019 | REVISI I | |
| 6. | 3/08-2019 | REVISI II | |
| 7. | 06/08-2019 | REVISI III : BAB 4 | |
| 8. | 16/08-2019 | REVISI KESELURUHAN | |
| 9. | 19/08-2019 | ACC SKRIPSI | |

Medan, 19 Agustus 2019...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

(Dr. Afifin Saleh, S.Sos.M.Pd, SP)

(NURHASANAH NAKTUDIN, S.Sos.M.Kom)

(AKHYAR ANSHORI, S.Sos.M.Kom)

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 748/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Rabu, 18 September 2019
 Waktu : 08.30 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

| | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Skripsi |
|---|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PEMBIMBING | |
| 1 | NUR INDAH | 1503110109 | IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP | AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom | Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si | POLA KOMUNIKASI DALAM PELESTARIAN PAK PONG DI KOTA MEDAN |
| 2 | WIRI ARIANA | 1503110177 | NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom | Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si | AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom | OPINI MASYARAKAT ASAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 |
| 3 | ERI FAURUAL ARJA | 1203110218-P | IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP | AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom | ELVITA YENNI, S.S, M.Hum | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PT. PLN (Persero) CABANG SINGKIL |
| 4 | AULIA ELLYYEN | 1403110139 | NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom | Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si | IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP | STRATEGI KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM MEWUJUDKAN POLA HIDUP SEHAT KOMUNITAS RUNMEDAN |

lis Sidang:

Medan, 16 Muharram 1441 H
 16 September 2019 M

Ditetapkan oleh :



Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ARIFIK SALEH, S.Sos., MSP.

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Wiri Ariana
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 02 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Merpati Lk. II
Anak ke : 4 (empat) dari 4 (empat) Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Ridarto
Pekerjaan : Wirausaha
Ibu : Milawati
Alamat : Jl. Merpati Lk.II

Pendidikan Formal

2002-2003 : TK Bhayangkari Kisaran
2003-2009 : SD Negeri 018452 Kisaran
2009-2012 : SMP Swasta Diponegoro Kisaran
2012-2015 : SMA Swasta Diponegoro Kisaran
2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara